

Franz Magnis-Suseno SJ

Centesimus Annus

PENGANTAR

Pada tanggal 1 Mei yang lalu Paus Johannes Paulus II menerbitkan ensiklik CENTESIMUS ANNUS [CA] untuk memperingati seratus tahun RERUM NOVARUM [RN], ensiklik pertama tentang masalah sosial yang diterbitkan oleh Paus Leo XIII pada tanggal 15 Mei 1891.

CA adalah ensiklik yang penting, kaya isinya dan sangat aktual. Secara khusus dapat disebut tiga keuntungan CA:

- [1] Ia memberikan fokus pada ajaran sosial Magisterium tertinggi Gereja sampai sekarang.
- [2] Ia membantu dalam mencari orientasi dalam situasi dunia pada akhir abad ke-20 yang ditandai oleh keambrokan sistem komunisme internasional, krisis makna masyarakat konsum Barat dan krisis kemiskinan yang semakin tajam, terutama di negara- negara berkembang.

- [3] Ia mempertegas sikap-sikap Gereja Katolik terhadap tantangan-tantangan etika sosial-politik; secara khusus CA menyediakan seperangkat ucapan pendukung terhadap segi-segi pokok perjuangan melawan ketidakadilan.

I. SUSUNAN CENTESIUM ANNUS

CA dibagi dalam sebuah pengantar dan enam bab. Namun ensiklik tidak bersistematika tegas: Banyak hal disinggung di beberapa tempat. Sifatnya bukan uraian teoretis tajam, melainkan renungan etis, akan tetapi secara mendalam dan seluruhnya to the point.

Pengantar a.l. menegaskan apa yang dilihat Paus sekarang sebagai keprihatinan dasar keterlibatan sosial-politik Gereja: (1) Pembelaan martabat manusia sebagai persona; (2) dan pembangunan masyarakat yang lebih adil. Juga ditegaskan batas-batas wewenang Magisterium: Analisa-analisa CA bukan mutlak sifatnya. Begitu pula Paus menegaskan bahwa "Gereja tidak menawarkan model-model" [tatanan masyarakat], melainkan "orientasi ideal" [nr. 43].

Bab pertama menegaskan kembali unsur-unsur RN yang tetap aktual [termasuk juga konteks RN: "Kekayaan luar biasa orang sedikit berhadapan dengan kemiskinan yang banyak", CA 5]. Di antaranya: Penolakan perjuangan kelas bersamaan dengan penegasan bahwa perdamaian harus dibangun atas

dasar keadilan. Penegasan **hak-hak dasar kaum buruh**, yaitu: hak untuk membentuk serikat buruh [CA 7], hak atas pembatasan waktu kerja [ib], atas upah yang adil yang berarti harus mencukupi bagi buruh bersama keluarganya [8], hak buruh untuk melakukan keagamaannya [CA 9].

Menurut Paus Johannes Paulus II prinsip solidaritas dan preferential option for the poor sebenarnya sudah termuat dalam RN.

Bab kedua membahas beberapa tantangan umat manusia dalam 100 tahun sesudah terbitnya RN. Ramalan Leo XIII bahwa sosialisme adalah cara salah untuk memecahkan masalah sosial dinyatakan terbukti tepat. Sosialisme terutama gagal karena berdasarkan gambaran manusia yang tidak sesuai dengan martabatnya sebagai persona. Apalagi sosialisme yang dihubungkan dengan ateisme [13, 14].

Begitu pula kritik RN terhadap **faham negara liberal** yang melepaskan bidang ekonomi dari tanggungjawab negara ternyata sangat relevan [15]. Negara wajib mencegah eksploitasi pihak yang lemah dan melindungi golongan-golongan yang marsinal. Totalitasime, perang-perang berdasarkan ideologi, perang saudara, genosid, perlombaan persenjataan, pemecahan kesatuan Eropa, militarisasi banyak negara berkembang, ancaman perang atom disebutkan. Bukan hanya Marxisme, melainkan juga "sistem-sistem 'keamanan nasional'" [à

la Amerika Latin, FMS; 19] dikritik. Diperingatkan bahwa dalam usaha untuk membangun tatanan demokratik perlu dihindari jangan-jangan mekanisme pasar menjadi acuan satu-satunya [16-19]. Dokumen-dokumen internasional [pernyataan hak asasi manusia oleh PBB; Final Act CSCE di Helsinki] dipuji [21].

Bab ketiga menyajikan pengamatan-pengamatan Paus sekitar kejadian-kejadian dahsyat tahun 1989. Paus menegaskan pembelaan Gereja terhadap hak-hak asasi manusia menyumbang terhadap jatuhnya resim-resim komunis Eropa Timur dan jatuhnya pelbagai resim diktatur di Amerika Latin, Afrika dan Asia [22].

Tahun 1989 menyaksikan kegagalan "sosialisme real", membuka kekosongan rohani yang ditinggalkan oleh ateisme, merupakan peringatan bagi mereka yang "atas nama realisme politik, mau menyingkirkan hukum dan moralitas dari arena politik" [25]. Paus mengecam mereka yang mengira "mempunyai rahasia organisasi sosial sempurna" di mana politik menjadi "agama sekuler" [ib.].

Telah terjadi pertemuan antara Gereja dan gerakan buruh. Gereja menawarkan "komitmen kongkret ... bagi perjuangan melawan marsinalisasi dan penderitaan", dan "menegaskan kembali nilai positif teologi pembebasan manusia integral yang otentik" [26].

Baik negara-negara Eropa Timur maupun negara-negara dunia ketiga perlu dibantu dalam pembangunan masyarakat mereka. Dalam hubungan ini Paus menegaskan bahwa "hak-hak suara hati manusia perlu diberikan pengakuan total". Ia melihat adanya ancaman dari tiga pihak terhadap kebebasan suara hati: [1] Dari sisa-sisa totalitarisme lama yang masih ada, [2] dari pendekatan yang semata-mata utilitaristik, dan [3] dari fundamentalisme religius [29].

Pasal [ke-empat](#) dalam pelbagai komentar menarik paling banyak perhatian. Bertolak dari afirmasi [hak milik pribadi](#) dalam RN Paus Johannes Paulus II memberikan uraian cukup panjang lebar dan canggih terhadap tatanan ekonomi macam apa yang pada akhir abad ke-20 kiranya dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Menurut Paus tahun 1989 memperlihatkan kebangkrutan "sosialisme real". Dari situ ia menarik kesimpulan bahwa mekanisme pasar memainkan peranan penting dan positif. Paus malah bicara tentang "segi-segi positif ekonomi bisnis modern" [32].

Akan tetapi ia memperingatkan sekaligus agar kebangkrutan sosialisme jangan diartikan sebagai kemenangan kapitalisme. "Banyak kebutuhan manusia tidak mempunyai tempat di pasar" [34]. Tuntutan martabat manusia tidak dapat dijamin semata-mata dengan mengikuti mekanisme pasar.

Hal itu terutama berlaku di negara-negara berkembang di mana sering masih terdapat kapitalisme dalam bentuk yang paling buruk. Di situ kebanyakan tuntutan dari RN masih tetap aktual [secara khusus disebut: upah yang secukupnya, asuransi hari tua dan tuna karya; perlindungan tempat kerja, 34].

Uraian panjang diberikan kepada cita-cita "masyarakat pekerjaan, usaha-usaha dan partisipasi bebas" [35 dst.], rupanya sebagai pengarahannya kepada negara-negara eks-komunis di Eropa Timur. Ditegaskan bahwa mekanisme pasar perlu dibatasi atau diarahkan baik oleh kekuatan-kekuatan sosial [seperti serikat buruh] maupun negara. Namun Paus menegaskan juga bahwa profit mempunyai peran yang legitim. Namun profit bukan satu-satunya maksud bisnis. Kewajiban menata pasar sedemikian hingga semua negara di dunia dan semua individu dapat menikmati kondisi-kondisi dasar agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan [hal mana memerlukan usaha seluruh komunitas internasional, ib]. Bagi negara-negara berkembang akses ke pasar internasional [33] dan pemecahan masalah hutang LN [35] diperkirakan memainkan peranan kunci.

Paus memberikan beberapa catatan terhadap konsumerisme yang pantas diperhatikan. **Konsumerisme** yang menjadi salah satu **sebab krisis ekologis** [37]. Perlu diwujudkan life-style-life-style baru yang tidak berorientasi pada having, me-

lainkan pada being [36], pada sikap terhadap benda dalam alam yang bebas pamrih dan estetik [35]. Sekaligus perlu dijamin "kondisi-kondisi moral sebuah 'ekologi sosial' otentik" ["an authentic 'human ecology'", 38].

Sistem ekonomi yang perlu dibangun menurut Paus dapat disebut "ekonomi bisnis", "ekonomi pasar", atau "ekonomi bebas", di mana "kapitalisme" merupakan "sistem di mana bidang ekonomi ... dibatasi oleh kerangka acuan hukum yang kuat, yang mengabdikannya pada kebebasan manusia dalam totalitasnya..." [42].

Dapat dikatakan bahwa Paus berusaha menghindari pendekatan hitam putih "kapitalisme" atau "sosialisme". Ekonomi akhir abad ke-20 mesti merupakan sistem canggih yang di satu pihak memanfaatkan enersi-energi dan kebebasan pasar, di lain pihak, melalui negara dan kekuatan-kekuatan sosial lain, menjamin bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang dan golongan sebagai manusia dan persona, melainkan juga keterarahan pada pewujudan kerangka kehidupan bersama yang memungkinkan manusia mengembangkan diri dalam semua aspek [individual dan sosial] menurut martabatnya sebagai persona. Di sini termasuk tekanan Paus pada kewajiban negara untuk berperan dalam bidang ekonomi, jadi pada peran negara sebagai "negara sosial", dengan sekaligus meno-

lak "negara sejahtera" di mana negara mengusahkan semuanya [dalam bab berikut, nr. 47].

Bab kelima, "**Negara dan Kebudayaan**" membahas dalam urutan bebas peran yang diharapkan dari negara dalam bidang **politik, sosial, ekonomis** dan **budaya**. Banyak tema penting disinggung, dan secara cukup mendalam, sehingga sangat berguna membaca pasal-pasal itu secara **meditatif**. Misalnya tentang keburukan totalitarianisme [44, 45], tentang demokrasi dan hak-hak asasi manusia [46-47], tentang ancaman fundamentalisme [46], tentang hak-hak asasi dalam bidang ekonomis [47], tentang keburukan korupsi [ib], tentang perhatian terhadap para pengungsi, imigran, kaum tua, orang-orang sakit, mereka yang ketagihan obat bius [48]. Dituntut penciptaan "jaringan-jaringan spesifik solidaritas" [49], tentang hubungan antara kebudayaan dan evangelisasi [50]. Dengan tajam Paus menegaskan "Tak pernah perang lagi!" [51].

Sedangkan pasal terakhir mengutarakan bahwa seluruh perkembangan perlu diarahkan pada keutuhan manusia sebagai persona dalam martabatnya yang citranya hanya dapat difahami dalam cahaya iman. Sedikit mengejutkan bahwa bab itu diakhiri dengan uraian kuat dan tegas tentang preferential option for the poor yang "menjadi kongkret dalam promotion of justice" [57, 58]. Akhirnya Paus mengundang semua fihak, semua agama, bahkan mereka yang tidak beragama, untuk

menyumbang sesuatu pada pendasaran etis masalah sosial [nr. 59, sebuah pernyataan dalam mulut seorang Paus yang sungguh mengherankan!].

II. BEBERAPA POKOK AJARAN CENTESIMUS ANNUS

Sesudah uraian singkat mengenai susunan ensiklik CA, berikut ini beberapa pokok bahasan diangkat secara khusus karena dianggap mempunyai relevansi besar bagi masyarakat politik akhir abad ke-20, tidak terkecuali di Indonesia.

1. BIDANG PERBURUHAN

CA adalah ensiklik kedua Paus Johannes Paulus II [sesudah LABOREM EXERCENS 1981] yang memberikan perhatian khusus pada dunia industri dan ekonomi modern. Karena kita sebagai negara berkembang masih juga berhadapan dengan ancaman kapitalisme kasar yang dikutuk Gereja, penegasan-penegasan Paus tentang hak-hak asasi kaum buruh amat relevan.

Kecuali penegasan hak buruh atas upah yang wajar ada dua penegasan yang memiliki relevansi khusus: Pertama hak buruh untuk membentuk serikat buruh. Kedua uraian tentang perjuangan kelas. Mengenai yang terakhir ada yang menarik. CA menyebutkan kutukan RN terhadap perjuangan kelas [nr. 5]. Tetapi dalam bab II CA sebaliknya mengutip QUADRAGESIMO ANNO yang menyatakan bahwa "apabila perjuangan

kelas menjauhi permusuhan dan saling kebencian, dia lama kelamaan berubah menjadi diskusi perbedaan-perbedaan yang berdasarkan hasrat akan keadilan." Lalu Paus melanjutkan bahwa yang dikutuk [oleh RN] dalam perjuangan kelas adalah gagasan bahwa konflik [buruh - majikan, FMS] tidak direm oleh pertimbangan-pertimbangan etis atau hukum, atau oleh hormat terhadap martabat pihak lawan [nr.14].

Uraian Paus ini penting untuk mendobrak faham miring bahwa kerukunan harus mendahului perjuangan demi keadilan. Dalam bahasa Paus, perdamaian memerlukan keadilan sebagai dasar [CA 5], dan oleh karena itu buruh berhak untuk memperjuangkannya. Kekeluargaan adalah hasil usaha bersama untuk membongkar ketidakadilan dan bukan sebaliknya.

2. DEMOKRASI DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Ensiklik CA merupakan salah satu pembelaan paling kuat dan eksplisit demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi (yang untuk pertama kalinya dipuji secara eksplisit, dengan menyebutkan pernyataan PBB 1948, dalam ensiklik *PACEM IN TERRIS*) menjadi salah satu unsur pokok dalam pandangan Paus sekarang tentang tatanan hukum masyarakat.

Dasarnya adalah faham Paus ini yang khas tentang martabat manusia, yaitu sebagai persona. Martabat itu dihormati dengan menghormati segi-segi hakiki martabat manusia itu

dalam semua dimensi eksistensinya. Segi-segi hakiki itulah yang mau dijamin melalui hak-hak asasi manusia. Dalam bahasa kita: Prinsip-prinsip luhur Pancasila menjadi realitas kalau eksplisitasnya dalam hak-hak asasi setiap anggota masyarakat sebagai manusia dihormati.

Sedangkan uraian Paus tentang demokrasi mengembangkan dengan lebih eksplisit apa yang sudah disinggung dalam SOLLICITUDO REI SOCIALIS [SRS, bdk. nr. 14 dan 44]. Dua nomor [CA nr. 46 dan 47] bicara secara khusus tentang demokrasi. Dapat dikatakan bahwa dengan demikian sebuah keraguan yang lama sekali meliputi sikap Pimpinan Gereja Katolik terhadap demokrasi akhirnya dijernihkan: Dalam dunia modern refleksi iman atas martabat manusia menuntut dukungan penuh terhadap pola kenegaraan demokratis.

Dalam CA Paus sangat ditekankan, tidak untuk pertama kalinya, **hak kebebasan suara hati** dan **kebebasan beragama**. Hormat terhadap kebebasan itu oleh Paus dianggap salah satu kunci bagi harkat kemanusiaan tatanan sebuah masyarakat [bdk. nr. 9, 23, 59, 46 (di mana ditegaskan bahwa iman kristiani bukan ideologi), 48 (kebebasan religius sebagai, "dalam arti tertentu, sumber dan sintesa semua hak" [asasi tersebut sebelumnya])].

3. TATANAN "EKONOMI BEBAS"

Tidak perlu diulang yang sudah disebutkan di atas, yaitu uraian canggih Paus tentang **tatanan ekonomi** yang di satu pihak memang memberikan haknya kepada pasar [dan menolak sosialisme doktriner], di lain pihak tidak mengizinkan pertimbangan keuntungan menjadi satu-satunya acuan [menolak anggapan bahwa keruntuhan sosialisme membuktikan kemenangan kapitalisme]; di mana Paus merenungkan sistem kompleks negara sosial: Sistem pasar yang perlu dipertahankan ditempatkan ke dalam sistem koordinat non- pasar yang ditetapkan oleh negara dan kekuatan sosial lainnya, yang berorientasi pada nilai-nilai utama kehidupan masyarakat bersama; di mana nilai-nilai itu adalah terutama solidaritas sosial, baik nasional maupun internasional, serta tersedianya kemungkinan bagi setiap anggota masyarakat untuk berkembang secara utuh sebagai persona.

Justru karena Paus menolak mengambil jalan hitam putih, dan dengan sengaja membatasi diri pada "orientasi", uraiannya itu penting dan pantas diperhatikan.

4. SOLIDARITAS DAN "PREFERENTIAL OPTION FOR THE POOR"

Meskipun "**prinsip solidaritas**" sudah sejak cukup lama diakui sebagai salah satu prinsip kunci ajaran sosial Gereja [di samping prinsip subsidiaritas], namun adalah Paus Johannes

Paulus II yang dalam ensiklik SRS memasukkan istilah "**solidaritas**" yang berasal dari alam bukan religius itu ke dalam bahasa resmi magisterium Gereja Katolik. Tuntutan solidaritas itu juga menjiwai CA.

Akan tetapi yang lebih mencolok ialah betapa besar tekanan yang diberikan Paus pada *preferential option for the poor*. Tiga kali istilah itu dipergunakan dalam CA [nr. 11, 56, 57]. Ditekankan bahwa "miskin" harus dimengerti dalam semua arti, jadi tidak hanya dalam arti ekonomis, tetapi Paus tidak membiarkan keragu-raguan bahwa kemiskinan ekonomis global dianggapnya sebagai salah satu tantangan paling besar bagi solidaritas umat manusia.

Yang menarik juga bahwa ensiklik CA pun menunjukkan gaya bicara yang semakin positif terhadap teologi pembebasan [CA 26].

5. MASALAH EKOLOGI

Secara pintas boleh dicatat bahwa dalam CA Paus Johannes Paulus II untuk kedua kalinya membicarakan masalah **lingkungan hidup** [sesudah SRS nr. 34], yaitu dalam nr. 37 [dan sedikit lagi di nr.52]. Memang sudah waktunya Gereja menyadari tanggungjawabnya terhadap bidang yang mahapenting ini.

PENUTUP

Ajakan Paus kepada **semua fihak, semua agama**, bahkan kepada mereka yang **tidak beragama** pada akhir CA agar mereka ikut dalam membangun dunia yang sesuai dengan **martabat manusia**, memperlihatkan bahwa ajaran sosial Gereja tidak eksklusif. Gereja tidak mengklaim mempunyai model tatanan masyarakat tersendiri. Dalam kongkretisasi ajaran etisnya ia mau belajar dari semua fihak.

Maka kita akan menempatkan ajakan Paus ke dalam kerangka faham dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita, **Pancasila**. Ajaran sosial Gereja justru mendesak kita untuk berusaha bersama seluruh bangsa atas dasar Pancasila.

Saya menutup uraian tentang CA ini dengan mengutip dua kalimat: "Pesan sosial injil jangan dianggap teori, melainkan terutama sebagai **dasar dan motivasi tindakan...**

Di zaman sekarang, lebih dari dulu, Gereja sadar bahwa pesan sosialnya akan memperoleh kredibilitas lebih langsung dari kesaksian tindakan daripada sebagai hasil logika dan konsistensi internal. **Kesadaran** itulah juga sebuah sumber perhatiannya yang mendahulukan orang-orang miskin yang tidak pernah eksklusif atau membedakan golongan-golongan lain" [CA nr. 57].

Semangat itu pun yang kiranya dapat memberikan kredibilitas kepada kesaksian kita dalam masyarakat Indonesia.

*Jakarta, tanggal 26 Mei 1991
Franz Magnis-Suseno SJ*



St. Peter's Basilica, in Vatican